

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU-BUKU

Romli Atmasasmita, Kapita selekta hukum pidana dan kriminologi, Mandar Maju, Bandung 1995, hal.135.

Hanafi Hendri, Penerapan restorative Justice di tingkat penyidikan dalam permasalahan tindak pidana lalu lintas di kabupaten Lahat (Palembang : Perpustakaan Fakultas Hukum Unsri Palembang) hal 1.

Budi Rizki Husin, studi lembaga penegak hukum, Bandar Lampung, Universitas Lampung, hlm. 15.

W.J.S Purwodarmito, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta : Balai Pustaka, 1986, hlm. 763.

Pusat pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Bahasa Indonesia, Volume 1, (Univeritas Michigan: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Departemen Pendidikan Kebudayaan, 1983), hal. 583.

Abu Ahmadi, Psikologi Sosial, (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1982), hal. 50.

Soekanto, Soerjono, Teori Peranan, (Jakarta: Bumi Aksara, 2002), hal. 243.

WJS Purwadarninto. 1985. Kamus Umum Bahasa Indonesia. Balai Pustaka. Jakarta. Hal. 555.

Subekti. 1985. Kamus Hukum . Pradya. Jakarta. Hal.74.

Randlon Naning. Op.cit. Hal. 17

Sutan Remy Sjahdeini.2007. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi.  
Grafiti Pers. Jakarta. Hal. 25.

Abdul Kholiq.2002. Buku Pedoman Kuliah Hukum Pidana.FH UII.  
Yogyakarta. Hal. 94.

Sutan Remy Sjahdeini.op.cit. Hal. 27

Jan Remmelink.2003.

Hukum Pidana “Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab  
Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab  
Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia. PT.Gramedia Pustaka Utama.  
Jakarta. Hal. 67.

Ranlon Naning.1983. Menggairahkan Kesadaran Hukum...op.cit. Hal.19.

Machmud Rahimi.2009. Makalah Pelatihan Penegakan Hukum Lalu  
Lintas. Jakarta, hal 37.

Soedjono Soekamto, 1976, Penanggulangan Kejahatan, Bandung, Alumni,  
hlm. 93.

Nursalam, Konsep dan Penerapan Metodologi Penelitian, Jakarta :  
Salemba Medika Jakarta, 2003, hlm. 81

Nursalam, hlm, 83

M.Nazir, ”Metode Penelitian” (Jakarta : Ghalia Indonesia ) 27

## **B. PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara  
Republik Indonesia, Pasal 5.

Republik Indonesia, Undang-undang RI Nomor 2 Tahun 2002 Tentang  
Kepolisian Negara Republik indonesia, Bab I, pasal 4.

Undang-Undang No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Peraturan Pemerintah Undang-Undang Republik Indonesia No 80 Tahun 2012 Tentang Tatacara Pemeriksaan Kendaraan bermotor dijalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 55 Tahun 2012 Tentang Kendaraan.

### **C. SUMBER LAIN**

<http://www.pengertianpakar.com/2015/08/pengertian-kejahatan-dan-pembahasannya.html> / diakses tanggal 11 Desember 2017 / pukul 14:00 wib.

<http://sarwono-supeno.blogspot.co.id/2012/04/pengertian-pelanggaran.html> / diakses tanggal 11 Desember 2017 / Pukul 14:00 wib.